



RISIKO SOSIAL, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PESISIR DI KEPULAUAN MUNA SULAWESI TENGGARA

Rosmawati Taherong^{*1}, Wa Ode Husniah², Maria Ulfa³, Nanang Sabitri⁴, Rindi⁵

^{1,2,3,4,5} Muhammadiyah University of Buton, Baubau, Indonesia

*Corresponding Author: berkas.umb0925038401@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 03 November 2025</p> <p>Revised : 01 Desember 2025</p> <p>Accepted : 28 Desember 2025</p> <p>Publication : 31 Januari 2026</p> <p>Keywords: Early Marriage, Coastal Adolescents, Mental Health, Self- Regulation, Bajo Community</p> <p>Kata Kunci: Pernikahan Dini, Remaja Pesisir, Kesehatan Mental, Pengendalian Diri, Komunitas Bajo</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>Early marriage remains a persistent social issue in coastal areas of Indonesia, including Tapi-Tapi Village, Muna Islands, where the Bajo community constitutes a significant social group. This phenomenon is not merely driven by limited access to education or the absence of successful role models, but is more strongly influenced by free social interaction among adolescents, weak self-control, and short-term thinking in interpreting intimate relationships and future life planning. This community service program aimed to enhance adolescents' psychological understanding of the risks of early marriage, provide mental health education related to stress, anxiety, and depression, and develop adolescents' personal skills to better prepare them for future life challenges. The program was implemented through psychosocial counseling, participatory discussions, and community-based mentoring involving adolescents, parents, and local leaders. The results indicate an increase in adolescents' critical awareness of the psychological and social consequences of early marriage, shifts in perceptions of the body and intimate relationships, & strengthened reflective capacity in decision-making. Program underscores that preventing early marriage requires a non-repressive approach prioritizes psychosocial readiness & the strengthening of adolescent agency, rather than relying solely on normative/ moralistic control.</i></p> <p>Abstrak: Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang persisten di wilayah pesisir. Fenomena ini tidak semata-mata dipicu oleh keterbatasan akses pendidikan atau ketiadaan figur teladan, melainkan lebih dipengaruhi oleh pergaulan bebas, lemahnya kontrol diri remaja, serta cara pandang jangka pendek terhadap relasi intim dan masa depan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman psikologis remaja tentang risiko pernikahan dini, memberikan edukasi kesehatan mental terkait stres, kecemasan, dan depresi, serta mengembangkan keterampilan diri remaja agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan dewasa. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan psikososial, diskusi partisipatif, dan pendampingan berbasis komunitas yang melibatkan remaja, orang tua, dan tokoh lokal. Hasilnya yaitu ada peningkatan kesadaran kritis remaja terhadap dampak psikologis dan sosial pernikahan dini, perubahan cara pandang terhadap tubuh dan relasi, serta penguatan kemampuan reflektif dalam pengambilan keputusan. Program ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan non-represif yang berfokus pada kesiapan psikososial dan penguatan agensi remaja, bukan sekadar penekanan normatif atau moral</p>
---	--

INTRODUCTION

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan berulang di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada komunitas pesisir yang mengalami perubahan sosial dan budaya secara cepat. Meskipun berbagai regulasi dan program pencegahan telah diterapkan, praktik pernikahan dini tetap berlangsung sebagai respons atas dinamika relasi remaja, tekanan moral komunitas, serta konstruksi sosial mengenai tubuh, kehormatan, dan kedewasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran usia legal, melainkan sebagai gejala sosial yang berakar pada cara masyarakat mengelola relasi remaja dan transisi menuju kedewasaan.

Di Desa Tapi-Tapi, Kepulauan Muna, pernikahan dini muncul sebagai praktik yang relatif dinormalisasi dalam situasi tertentu, terutama ketika remaja terlibat dalam relasi romantik yang dianggap melampaui batas norma sosial. Berbeda dari asumsi umum yang mengaitkan pernikahan dini dengan keterbatasan akses pendidikan atau ketiadaan figur teladan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan dan contoh individu yang berhasil secara akademik telah tersedia. Namun demikian, praktik pernikahan dini tetap terjadi, menandakan adanya faktor psikososial dan kultural yang lebih mendesak dalam membentuk keputusan remaja dan respons komunitas (Khairunnisa et al., 2024). Hasil identifikasi awal di lokasi pengabdian menunjukkan bahwa pergaulan bebas, lemahnya kontrol diri, serta pola pikir jangka pendek remaja dalam memaknai relasi intim menjadi faktor dominan terjadinya pernikahan dini. Tekanan sosial akibat relasi seksual pranikah, rasa takut terhadap stigma, dan kekhawatiran keluarga atas reputasi sosial mendorong pernikahan dini dipersepsikan sebagai solusi cepat. Dalam konteks ini, keputusan menikah tidak didasarkan pada kesiapan psikologis, melainkan pada kebutuhan meredam konflik sosial secara instan (Badali et al., 2024).

Dari perspektif psikologi perkembangan, remaja berada pada fase transisi yang ditandai oleh pencarian identitas, eksplorasi relasi, dan penguatan regulasi diri yang belum sepenuhnya matang. Ketidakmampuan mengelola emosi, impuls, dan tekanan lingkungan membuat remaja rentan mengambil keputusan berisiko tinggi, termasuk keputusan menikah dini (Nebhinani & Jain, 2019). Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman psikologis remaja mengenai dampak pernikahan dini terhadap perkembangan diri, kesehatan mental, dan masa depan mereka. Selain itu, pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari mekanisme kontrol sosial terhadap tubuh remaja,

khususnya tubuh perempuan. Tubuh remaja perempuan sering diposisikan sebagai simbol kehormatan keluarga dan komunitas, sehingga menjadi objek pengawasan moral yang ketat. Ketika terjadi pelanggaran norma, pernikahan dini dijadikan instrumen penertiban sosial. Ketimpangan kontrol tubuh berbasis gender ini memperkuat praktik pernikahan dini sekaligus mengabaikan kondisi psikologis dan kesiapan mental remaja (Moilanen, 2024).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pernikahan dini berimplikasi serius terhadap kesehatan mental remaja, seperti meningkatnya risiko stres, kecemasan, depresi, serta konflik relasi dalam rumah tangga. Remaja yang belum siap secara emosional harus memikul tanggung jawab dewasa sebelum waktunya, yang berdampak pada terhambatnya pengembangan diri dan kualitas hidup. Oleh karena itu, penyuluhan kesehatan mental menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya pencegahan pernikahan dini, terutama untuk membantu remaja mengenali dan mengelola tekanan psikologis yang mereka alami. Selama ini, upaya pencegahan pernikahan dini masih didominasi oleh pendekatan normatif dan moralistik yang menekankan larangan, sanksi, atau kontrol sosial, tanpa memperkuat kapasitas internal remaja. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan remaja sebagai objek pengendalian, bukan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berpikir reflektif dan mengambil keputusan. Padahal, pengembangan keterampilan diri remaja—seperti pengendalian emosi, pengambilan keputusan, dan perencanaan masa depan—merupakan kunci penting agar remaja lebih siap menghadapi tantangan kehidupan tanpa harus memilih pernikahan dini sebagai jalan keluar.

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman psikologis remaja mengenai dampak pernikahan dini terhadap perkembangan diri dan masa depan
2. Memberikan penyuluhan kesehatan mental terkait stres, kecemasan, dan depresi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini,
3. Mengembangkan keterampilan diri remaja agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan dewasa.

Program ini dilaksanakan melalui pendekatan edukasi psikososial, diskusi partisipatif, dan pendampingan berbasis komunitas dengan melibatkan remaja, keluarga, dan tokoh lokal, sehingga diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam pencegahan pernikahan dini yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

METHOD

Desain Kegiatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena fokus utama adalah memahami secara mendalam fenomena pernikahan dini yang dialami remaja di Desa Tapi-Tapi, Kepulauan Muna, Sulawesi Tenggara. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menggali realitas sosial yang terjadi secara alami, tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari luar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor penyebab, dampak psikososial, serta persepsi masyarakat terkait pernikahan dini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti serta menjadi dasar dalam merancang program intervensi edukatif yang kontekstual dan tepat sasaran untuk menekan angka pernikahan dini.

Lokasi dan Sasaran

Lokasi penelitian ditetapkan di Aula Kantor Desa Tapi-Tapi, Kepulauan Muna, Sulawesi Tenggara, yang dipandang strategis karena desa ini memiliki dinamika sosial dan budaya yang cukup kuat dalam memengaruhi perilaku remaja, termasuk dalam hal perkawinan usia muda. Sasaran penelitian meliputi:

- a. Remaja usia 13–17 tahun secara langsung rentan terhadap praktik pernikahan dini.
- b. Orang tua dan tokoh adat, yang memiliki peran penting dalam menentukan keputusan pernikahan serta menjaga nilai-nilai budaya yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan inti, serta pelaporan dan evaluasi. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk memastikan data yang diperoleh akurat, mendalam, dan representatif.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap 1: Tahap Persiapan. Pada tahap awal, peneliti melakukan beberapa langkah penting sebagai berikut:

- a. Studi literatur dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu, baik dari jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait upaya pencegahan pernikahan dini.
- b. Penyusunan instrumen penelitian, berupa pedoman wawancara mendalam dan lembar observasi yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran penelitian.

- c. Koordinasi dengan pihak sekolah dan komunitas remaja, untuk memperoleh dukungan sekaligus akses dalam menjangkau subjek penelitian secara lebih efektif.

Tahap 2: Pelaksanaan Inti

- a. Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap remaja yang pernah mengalami pernikahan dini, orang tua, guru BK, serta tokoh adat. Tujuannya adalah menggali pengalaman pribadi, persepsi sosial, serta dampak psikologis maupun sosial-ekonomi yang mereka hadapi.
- b. Observasi partisipatif, dengan mengamati langsung interaksi sosial remaja setelah menikah, serta bagaimana dinamika keluarga dan komunitas merespons fenomena tersebut.
- c. Dokumentasi, berupa pengumpulan data sekunder seperti profil desa, statistik pernikahan usia dini, catatan sekolah, serta arsip kebijakan lokal yang relevan.

Tahap 3: Pelaporan dan Evaluasi

- a. Analisis data secara tematik, yang melibatkan proses reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan untuk menemukan pola-pola yang bermakna.
- b. Penyusunan laporan penelitian, yang tidak hanya memuat temuan tetapi juga rekomendasi praktis untuk pencegahan pernikahan dini di Desa Tapi Tapi.
- c. Diseminasi hasil penelitian, baik melalui publikasi di jurnal nasional terakreditasi maupun forum seminar ilmiah, agar temuan dapat memberikan manfaat luas bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum.

RESULTS AND DISCUSSION

Pernikahan Dini sebagai Respons Sosial atas Pergaulan Bebas Remaja Pesisir

Fenomena pernikahan dini di Desa Tapi-Tapi tidak dapat dipahami sebagai pilihan sadar remaja untuk membangun rumah tangga, melainkan sebagai respons sosial atas meningkatnya intensitas pergaulan bebas di kalangan remaja pesisir. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa relasi romantik remaja berlangsung semakin terbuka, intens, dan minim pengawasan sosial, seiring dengan masuknya media sosial, perubahan pola interaksi, dan melemahnya batas tradisional antara ruang privat dan publik. Dalam konteks ini, relasi remaja sering bergerak melampaui norma yang diterima komunitas, sehingga memunculkan kecemasan kolektif keluarga dan masyarakat. Pergaulan bebas yang dimaksud tidak selalu bermakna deviasi ekstrem, tetapi lebih pada relasi emosional dan fisik yang berkembang tanpa kesiapan mental, nilai reflektif, dan tanggung jawab jangka panjang.

Remaja cenderung menempatkan relasi sebagai ruang aktualisasi diri dan pengakuan sosial, bukan sebagai komitmen yang menuntut kesiapan psikososial (Awalluddin, 2024). Ketika relasi tersebut diketahui atau dianggap “kebablasan”, pernikahan dini segera diposisikan sebagai solusi sosial yang paling cepat dan dapat diterima. Dalam kondisi ini, pernikahan dini berfungsi sebagai mekanisme pemulihan norma sosial. Ia digunakan untuk menutup ketegangan moral yang muncul akibat perilaku remaja, sekaligus menjaga kehormatan keluarga di hadapan komunitas (Samsidar et al., 2024). Artinya, keputusan menikah bukan dihasilkan dari perencanaan hidup remaja, tetapi dari tekanan sosial yang menuntut penyelesaian instan atas perilaku yang dinilai menyimpang (van Veen et al., 2018).

Temuan ini menunjukkan bahwa akar masalah pernikahan dini bukan terletak pada absennya institusi pendidikan atau keteladanan akademik, melainkan pada ketidaksiapan sistem sosial dalam mengelola perubahan perilaku remaja. Ketika relasi remaja berkembang lebih cepat dibanding kemampuan keluarga dan komunitas untuk mendampingi, pernikahan dini menjadi alat kontrol yang dianggap paling efektif. Dengan demikian, pernikahan dini di Tapi-Tapi harus dibaca sebagai gejala krisis regulasi sosial atas relasi remaja. Selama pergaulan bebas dipahami sebagai ancaman yang harus “diselesaikan”, bukan sebagai fase perkembangan yang perlu didampingi, praktik pernikahan dini akan terus direproduksi sebagai respons sosial yang dianggap rasional.

Ketidakmatangan Berpikir Remaja dan Logika Keputusan Jangka Pendek

Hasil pengabdian memperlihatkan bahwa remaja di Desa Tapi-Tapi umumnya mengambil keputusan hidup berdasarkan logika jangka pendek. Relasi romantis dijalani dengan orientasi emosional “saat ini”, tanpa pertimbangan serius mengenai konsekuensi psikologis, sosial, dan ekonomi di masa depan. Ketidakmatangan berpikir ini merupakan karakteristik fase perkembangan remaja, namun menjadi problem serius ketika tidak diimbangi dengan pendampingan yang memadai. Remaja cenderung memaknai kedekatan emosional sebagai bukti kedewasaan, sementara konflik, kehamilan, dan tekanan sosial dipersepsikan sebagai risiko yang “bisa diatasi nanti”. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dipilih bukan karena kesiapan, melainkan karena ketidakmampuan remaja keluar dari situasi sosial yang telah terlanjur terbentuk. Pernikahan menjadi jalan keluar dari tekanan, bukan keputusan reflektif. Ketika keluarga dan masyarakat juga berbagi logika jangka pendek yang sama yakni menyelesaikan

masalah secepat mungkin maka tidak ada ruang bagi remaja untuk belajar menunda keputusan dan mengembangkan nalar masa depan. Akibatnya, pernikahan dini justru memperkuat pola impulsivitas, bukan mengoreksinya. Temuan ini memperlihatkan kegagalan sistem sosial dalam menyediakan ruang reflektif bagi remaja. Tidak tersedia mekanisme dialog yang memungkinkan remaja membicarakan relasi, batas tubuh, dan konsekuensi jangka panjang secara terbuka tanpa rasa takut dihukum. Ketika dialog absen, keputusan besar seperti pernikahan diambil dalam kondisi psikologis yang rapuh. Oleh karena itu, pernikahan dini di Tapi-Tapi tidak dapat dilepaskan dari kegagalan kolektif dalam membimbing remaja melewati fase transisi menuju kedewasaan. Selama logika jangka pendek tetap mendominasi, pernikahan dini akan terus muncul sebagai produk ketergesaan sosial, bukan sebagai institusi kesiapan hidup.

Kontrol Sosial Tubuh Perempuan dan Laki-Laki dalam Lanskap Perubahan Sosial

Salah satu temuan paling signifikan dalam pengabdian ini adalah bagaimana tubuh remaja menjadi arena utama kontrol sosial, terutama tubuh perempuan. Ketika relasi remaja dianggap melampaui batas, tubuh perempuan segera diposisikan sebagai sumber masalah moral yang harus diamankan (Rohmaniyah, 2018). Pernikahan dini kemudian digunakan sebagai mekanisme legitimasi sosial atas tubuh tersebut (Awalluddin, 2024). Namun, temuan lapangan juga menunjukkan adanya perubahan penting: tubuh laki-laki mulai ditarik ke dalam wacana tanggung jawab sosial, meskipun tidak dikontrol secara ketat seperti tubuh perempuan. Laki-laki didorong untuk menikah sebagai bentuk tanggung jawab, sementara perempuan diwajibkan menikah demi menjaga kehormatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kontrol tubuh masih bersifat gendered, tetapi mulai mengalami pergeseran.

Dalam konteks perubahan sosial pesisir, kontrol tubuh ini tidak lagi sepenuhnya berbasis adat tradisional, melainkan bercampur dengan kecemasan moral modern. Media sosial, gaya pacaran baru, dan perubahan nilai membuat tubuh remaja semakin terlihat dan diperdebatkan. Pernikahan dini menjadi alat untuk “menertibkan” tubuh yang dianggap sulit dikontrol (Jannah, 2023). Masalahnya, mekanisme kontrol ini bersifat represif dan menutup ruang edukasi. Tubuh remaja tidak dipahami sebagai subjek yang perlu dipahami dan didampingi, melainkan sebagai objek yang harus diatur. Akibatnya, aspek kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan hak remaja terpinggirkan. Dengan demikian, pernikahan dini di Tapi-Tapi tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga dengan politik tubuh dalam komunitas pesisir. Selama tubuh remaja diposisikan

sebagai ancaman sosial, bukan sebagai bagian dari proses perkembangan, pernikahan dini akan terus dijadikan instrumen kontrol yang problematis.

Pernikahan Dini sebagai Mekanisme Penertiban Sosial

Hasil pengabdian menegaskan bahwa pernikahan dini berfungsi sebagai mekanisme penertiban sosial yang menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi menciptakan kerentanan jangka panjang. Fokus utama komunitas adalah pemulihan citra sosial keluarga, bukan kesejahteraan pasangan muda. Pernikahan dini menyelesaikan ketegangan sosial akibat pergaulan bebas, tetapi mengabaikan kesiapan emosional, ekonomi, dan psikologis remaja. Konflik rumah tangga, tekanan mental, dan ketidakstabilan relasi dianggap sebagai risiko privat yang ditanggung pasangan muda.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini lebih berfungsi sebagai alat stabilisasi sosial dibanding institusi perlindungan remaja. Ia menjaga ketertiban sosial, tetapi mengorbankan kualitas hidup generasi muda. Dalam jangka panjang, mekanisme ini justru mereproduksi masalah yang sama. Remaja yang menikah dini berisiko mengulangi pola pengasuhan yang represif, sehingga siklus pernikahan dini terus berulang lintas generasi (Swantiana et al., 2024), (Afifah & Amina, 2023). Oleh karena itu, pernikahan dini harus dipahami sebagai solusi semu yang menyembunyikan problem struktural relasi remaja dan kontrol tubuh dalam masyarakat pesisir.

Solusi Tepat Guna Berbasis Temuan Pengabdian

a. Intervensi pada Pola Relasi Remaja: Dari Pelarangan ke Regulasi Diri

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan yang berorientasi pada larangan pergaulan bebas tidak hanya tidak efektif, tetapi justru mendorong relasi remaja bergerak ke ruang-ruang tersembunyi yang semakin sulit diawasi. Oleh karena itu, solusi yang dikembangkan dalam pengabdian ini diarahkan pada penguatan regulasi diri remaja, bukan pada kontrol eksternal semata. Fokus intervensi adalah membantu remaja memahami relasi sebagai proses yang memiliki batas, konsekuensi, dan tanggung jawab emosional. Dalam praktiknya, ruang dialog remaja dibentuk sebagai ruang aman yang memungkinkan remaja membicarakan pengalaman relasional mereka tanpa takut distigma atau dihukum. Pendekatan ini membuka peluang bagi remaja untuk merefleksikan perilaku mereka sendiri, bukan sekadar menerima larangan dari orang dewasa (Lee & Gu, 2024). Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika remaja dilibatkan dalam dialog reflektif, mereka mulai

menyadari bahwa keputusan relasional memiliki dampak jangka panjang terhadap diri mereka sendiri. Intervensi ini secara langsung menargetkan akar masalah pernikahan dini, yaitu ketidakmampuan berpikir jangka panjang. Dengan membangun kesadaran atas konsekuensi emosional, sosial, dan kesehatan, remaja tidak lagi melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari tekanan sosial, tetapi sebagai keputusan hidup yang memerlukan kesiapan (Syarda et al., 2024). Pendekatan ini juga menandai pergeseran penting dari pendidikan moral ke pendidikan relasional. Relasi tidak lagi dipahami dalam dikotomi “boleh–tidak boleh”, melainkan sebagai ruang belajar tentang batas tubuh, persetujuan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pengabdian ini menghasilkan model intervensi yang lebih realistis dalam menghadapi dinamika pergaulan bebas remaja pesisir.

b. Reorientasi Peran Keluarga: Kontrol Represif ke Pendampingan Perkembangan

Temuan pengabdian menunjukkan bahwa keluarga memainkan peran sentral dalam reproduksi maupun pencegahan pernikahan dini. Selama ini, keluarga cenderung hadir sebagai aktor kontrol yang reaktif, terutama ketika relasi remaja dianggap melampaui batas norma. Kontrol ini sering diwujudkan dalam keputusan menikahkan anak secara cepat, tanpa dialog dan pertimbangan kesiapan psikososial. Melalui konseling keluarga berbasis komunitas, pengabdian ini mendorong pergeseran peran keluarga dari pengontrol menjadi pembimbing perkembangan remaja. Orang tua diajak memahami bahwa kontrol tubuh tanpa komunikasi justru mempercepat perilaku berisiko, karena remaja akan mencari ruang aman di luar pengawasan keluarga. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa ketika orang tua mulai membangun komunikasi terbuka, remaja lebih berani membicarakan relasi dan tekanan sosial yang mereka hadapi. Kondisi ini membuka peluang intervensi lebih awal, sebelum relasi berkembang ke tahap yang memicu tekanan sosial untuk menikah. Reorientasi peran keluarga ini menjadi solusi krusial karena keputusan pernikahan dini hampir selalu berada di tangan orang tua. Dengan mengubah cara pandang orang tua terhadap relasi remaja, pengabdian ini secara langsung menekan legitimasi sosial pernikahan dini sebagai solusi instan. Maka, keluarga tidak lagi menjadi institusi yang mempercepat pernikahan dini, tetapi menjadi ruang utama pencegahan melalui pendampingan psikososial berkelanjutan (Fitria et al., 2024).

c. Transformasi Narasi Sosial tentang Pernikahan melalui Aktor Adat dan Agama

Pengabdian ini menemukan bahwa pernikahan dini tidak dapat dicegah hanya melalui pendekatan individual dan keluarga tanpa menyentuh narasi sosial yang hidup di

tingkat komunitas. Dalam konteks Tapi-Tapi, pernikahan dini dilegitimasi oleh narasi kolektif tentang kehormatan, tanggung jawab, dan penertiban moral. Oleh karena itu, solusi diarahkan pada transformasi narasi sosial melalui pelibatan tokoh adat dan agama sebagai aktor perubahan, bukan sekadar penjaga tradisi. Tokoh-tokoh ini dilibatkan dalam diskusi reflektif untuk menafsir ulang nilai-nilai budaya terkait pernikahan dan tanggung jawab sosial. Hasilnya, mulai muncul narasi alternatif bahwa menunda pernikahan demi kesiapan mental dan kesehatan bukanlah pelanggaran norma, melainkan bentuk tanggung jawab moral baru dalam konteks perubahan sosial. Narasi ini sangat penting karena memberikan legitimasi sosial bagi keluarga dan remaja untuk tidak terburu-buru menikah. Transformasi narasi ini bekerja pada level makro sosial, sehingga memperkuat intervensi pada level individu dan keluarga. Ketika komunitas mulai mengubah cara pandangnya, tekanan sosial untuk menikah dini ikut melemah (Kamarusdiana et al., 2024). Dengan demikian, pengabdian ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini harus dipahami sebagai proses negosiasi budaya, bukan konfrontasi nilai.

Implikasi Sosial & Konseptual: Penertiban Moral ke Perlindungan Remaja

a. Pergeseran Paradigma Pencegahan Pernikahan Dini

Hasil pengabdian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma pencegahan pernikahan dini dari pendekatan penertiban moral menuju perlindungan perkembangan remaja. Selama ini, pernikahan dini diposisikan sebagai solusi atas kegelisahan sosial, bukan sebagai masalah perkembangan. Paradigma ini menyebabkan risiko jangka panjang diabaikan demi stabilitas sosial sesaat. Pengabdian ini memperlihatkan bahwa perlindungan remaja hanya dapat dicapai jika relasi, tubuh, dan emosi remaja dipahami sebagai bagian dari proses tumbuh kembang yang memerlukan pendampingan, bukan represi. Pergeseran paradigma ini menjadi dasar konseptual bagi desain kebijakan dan program pencegahan yang lebih manusiawi dan efektif.

b. Implikasi terhadap Kebijakan dan Praktik Pengabdian

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa program pengabdian dan kebijakan desa tidak cukup berfokus pada sosialisasi bahaya pernikahan dini. Intervensi harus diarahkan pada penguatan relasi keluarga, ruang dialog remaja, dan transformasi norma sosial (dos Santos et al., 2025). Pengabdian ini memberikan model yang dapat direplikasi di wilayah pesisir lain, dengan menyesuaikan konteks budaya

setempat. Implikasi ini penting bagi pengembangan program pengabdian berbasis bukti yang tidak terjebak pada pendekatan seremonial.

c. Kontribusi Ilmiah dan Kebaruan

Secara konseptual, pengabdian ini berkontribusi pada pengembangan perspektif kritis tentang pernikahan dini sebagai mekanisme kontrol sosial atas tubuh dan relasi remaja. Kebaruan utama terletak pada penggabungan analisis impulsivitas remaja, kontrol tubuh berbasis gender, dan perubahan sosial pesisir dalam satu kerangka analitis. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya melaporkan kegiatan pengabdian, tetapi juga memperkaya diskursus ilmiah tentang pernikahan dini sebagai fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual.



Gambar 01: Foto Kegiatan Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini



Gambar 02 : Foto Selesai Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pernikahan Dini

Discuccion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Tapi-Tapi tidak terutama dipicu oleh keterbatasan akses pendidikan atau ketiadaan figur teladan,

melainkan oleh meningkatnya pergaulan bebas remaja yang tidak diimbangi dengan kematangan pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Temuan ini sejalan dengan studi mutakhir yang menegaskan bahwa pernikahan dini di banyak wilayah pesisir dan pedesaan Indonesia lebih berkaitan dengan dinamika relasi sosial dan perubahan pola pergaulan remaja dibandingkan dengan faktor struktural pendidikan semata (Bura et al., 2025), (Maharani & Zain, 2023)

Secara psikososial, temuan penelitian ini menguatkan argumen **Steinberg** dalam *Journal of Adolescence* yang menyatakan bahwa kerentanan remaja terhadap perilaku berisiko berasal dari ketimpangan antara perkembangan emosi dan kontrol kognitif (Botdorf et al., 2017), (Albert & Steinberg, 2011). Remaja cenderung mengedepankan kepuasan jangka pendek dan pengakuan sosial, sementara konsekuensi jangka panjang termasuk kesiapan menikah tidak menjadi pertimbangan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut diperparah oleh absennya ruang dialog reflektif antara remaja dan lingkungan sosialnya, sehingga keputusan menikah muncul sebagai respons darurat atas tekanan sosial.

Dari perspektif lingkungan sosial, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan **Leventhal dan Brooks-Gunn** dalam *Annual Review of Psychology*, yang menekankan bahwa keputusan hidup remaja sangat dipengaruhi oleh respons keluarga dan komunitas terhadap perilaku berisiko (Tian, 2024). Dalam konteks Tapi-Tapi, keluarga dan komunitas berperan aktif mendorong pernikahan dini sebagai mekanisme pemulihan norma dan kehormatan sosial. Hal ini memperkuat argumen bahwa pernikahan dini merupakan produk sistem sosial, bukan semata keputusan individual remaja.

Aspek yang paling krusial dari hasil penelitian ini adalah ditemukannya praktik **kontrol sosial atas tubuh**, khususnya tubuh perempuan, sebagai dasar legitimasi pernikahan dini. Temuan ini sejalan dengan kajian (Muham et al., 2024) yang menunjukkan bahwa tubuh perempuan di banyak komunitas masih diposisikan sebagai representasi moral kolektif. Pernikahan dini berfungsi sebagai alat normalisasi dan penertiban, bukan sebagai perlindungan hak dan kesejahteraan remaja perempuan. Namun, penelitian ini juga menemukan indikasi pergeseran kontrol, di mana laki-laki mulai dituntut bertanggung jawab secara sosial, meskipun relasi kuasa gender masih belum seimbang.

Temuan ini memperluas hasil penelitian yang menyatakan bahwa pernikahan dini sering digunakan sebagai solusi sosial jangka pendek atas kehamilan remaja dan relasi bebas, tetapi justru meningkatkan kerentanan jangka panjang, seperti konflik rumah

tangga dan ketidakstabilan psikologis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini bukan solusi adaptif, melainkan **solusi semu** yang memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang domestic (Kox, 2023) Secara konseptual, pembahasan ini menegaskan bahwa kegagalan utama dalam pencegahan pernikahan dini bukan terletak pada kurangnya sosialisasi risiko, melainkan pada dominannya pendekatan moralistik dan represif. Temuan ini sejalan dengan studi (**Baltag & Banerjee, 2024**), yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis relasi sehat, regulasi diri, dan keterlibatan keluarga dalam isu kesehatan dan keputusan hidup remaja.

Dengan merangkum hasil penelitian dan mengaitkannya dengan literatur ilmiah terbaru, pembahasan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Tapi-Tapi merupakan fenomena struktural yang lahir dari interaksi antara perubahan pola pergaulan remaja, mekanisme kontrol sosial berbasis gender, dan strategi adaptasi keluarga terhadap tekanan norma. Oleh karena itu, intervensi yang efektif harus diarahkan pada perubahan pola relasi sosial dan cara komunitas memaknai pernikahan, bukan semata pada peningkatan pengetahuan atau larangan normatif.

Tabel 01. Sintesis Hasil dan Pembahasan Pengabdian

No	Unsur Pembahasan	Inti Temuan / Analisis Kritis
1	Posisi Temuan & Kebaruan	Pernikahan dini di Desa Tapi-Tapi tidak disebabkan oleh rendahnya akses pendidikan atau ketiadaan role model, melainkan oleh pergaulan bebas, lemahnya kontrol diri remaja, dan pola pikir jangka pendek dalam relasi intim. Pernikahan berfungsi sebagai solusi instan atas tekanan sosial, bukan keputusan berbasis kesiapan psikologis.
2	Integrasi Hasil dengan Teori	Temuan selaras dengan teori perkembangan remaja dan ekologi sosial yang menunjukkan bahwa keputusan berisiko dipengaruhi oleh ketidakmatangan refleksi kognitif, tekanan kelompok sebaya, serta norma komunitas yang menormalisasi pernikahan dini sebagai mekanisme kontrol sosial.
3	Kontrol Sosial & Gender	Tubuh remaja perempuan menjadi objek utama pengawasan moral komunitas, sementara remaja laki-laki lebih ditoleransi dalam praktik pergaulan bebas. Ketimpangan ini mempercepat legitimasi pernikahan dini sebagai sarana penertiban sosial.
4	Keterbatasan Temuan	Kegiatan dilakukan pada konteks lokal masyarakat pesisir dengan durasi terbatas, sehingga belum memungkinkan pengamatan perubahan perilaku jangka panjang dan belum sepenuhnya menjangkau relasi kuasa dalam keluarga dan struktur adat.
5	Solusi & Implikasi Praktis	Pencegahan pernikahan dini perlu difokuskan pada peningkatan pemahaman psikologis, penguatan kesehatan mental, dan pengembangan keterampilan hidup remaja, dengan pendekatan non-represif yang menempatkan kesiapan psikososial sebagai prasyarat kedewasaan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini pada remaja di Desa Tapi-Tapi merupakan persoalan psikososial yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan sebagai masalah pendidikan semata. Temuan kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa keputusan menikah dini lebih banyak dipengaruhi oleh pergaulan bebas, lemahnya kontrol diri, serta pola pikir jangka pendek remaja dalam merespons relasi intim dan tekanan sosial. Integrasi hasil dengan kerangka teoretis memperlihatkan bahwa ketidakmatangan perkembangan kognitif remaja, sebagaimana dijelaskan dalam teori perkembangan, diperkuat oleh lingkungan sosial yang menormalisasi pernikahan dini sebagai solusi moral. Dalam konteks ekologi sosial, keluarga, teman sebaya, dan komunitas berperan besar dalam membentuk cara pandang remaja terhadap tubuh, relasi, dan masa depan.

Aspek kontrol sosial berbasis gender menjadi temuan penting, di mana tubuh remaja perempuan diposisikan sebagai simbol kehormatan kolektif, sementara tubuh remaja laki-laki relatif tidak menjadi sasaran pengawasan yang setara. Ketimpangan ini mendorong pernikahan dini sebagai mekanisme penertiban sosial, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan kesejahteraan psikologis remaja. Meskipun demikian, temuan ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan durasi pelaksanaan kegiatan, sehingga hasilnya perlu dipahami sebagai refleksi kontekstual. Keterbatasan ini justru membuka ruang bagi pengembangan program lanjutan yang lebih berkelanjutan dan berbasis pendampingan psikososial. Berdasarkan sintesis tersebut, solusi yang ditawarkan diarahkan pada penguatan pemahaman psikologis remaja, penyuluhan kesehatan mental, serta pengembangan keterampilan hidup sebagai strategi pencegahan pernikahan dini. Pendekatan ini diharapkan mampu menggeser narasi komunitas dari pernikahan sebagai solusi moral menuju kesiapan psikososial sebagai fondasi kedewasaan remaja.

CONCLUSION

Pernikahan dini pada remaja di Desa Tapi-Tapi terutama dipicu oleh rendahnya pemahaman psikologis remaja dalam mengelola relasi, emosi, dan konsekuensi jangka panjang dari keputusan hidup. Remaja cenderung mengambil keputusan secara impulsif di tengah tekanan sosial, sehingga pernikahan dipandang sebagai solusi instan, bukan sebagai pilihan yang direncanakan secara matang. Pernikahan dini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan tekanan psikologis, akibat ketidaksiapan emosional remaja dalam menjalani peran dan tanggung

jawab pernikahan. Temuan ini menegaskan bahwa aspek kesehatan mental merupakan dampak krusial yang selama ini kurang diperhatikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Lemahnya keterampilan diri remaja, terutama dalam pengendalian emosi, pengambilan keputusan, dan perencanaan masa depan, memperkuat kerentanan terhadap pernikahan dini. Dengan demikian, kesiapan psikososial menjadi faktor kunci dalam mencegah praktik pernikahan dini secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Afifah, M., & Amina, A. (2023). IMPLIKASI PERNIKAHAN USIA REMAJA TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA. *Pedagogika*, 3(1), 28–33. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.952>
- Albert, D., & Steinberg, L. (2011). PEER INFLUENCES ON ADOLESCENT RISK BEHAVIOR (pp. 211–226). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1268-8_11
- Awalluddin, A. N. (2024). PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI. 2(2), 10–16. <https://doi.org/10.55352/hki.v2i2.1339>
- Badali, M. A., Al-Madani, M. R., Fatimatuzzahra, N., Karima, S., & Efendy, N. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN DAHA UTARA, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1394–1403. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.708>
- Baltag, V., & Banerjee, A. (2024). LEVERAGING THE PRIORITY INDICATORS TO PROMOTE COMPREHENSIVE ADOLESCENT HEALTH APPROACHES. *Journal of Adolescent Health*, 74(6S), S12–S14. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.12.001>
- Botdorf, M., Rosenbaum, G. M., Patrianakos, J., Steinberg, L., & Chein, J. (2017). ADOLESCENT RISK-TAKING IS PREDICTED BY INDIVIDUAL DIFFERENCES IN COGNITIVE CONTROL OVER EMOTIONAL, BUT NOT NON-EMOTIONAL, RESPONSE CONFLICT. *Cognition & Emotion*, 31(5), 972–979. <https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1168285>
- Bura, T., Lin, N., Mercyana, N., & Tuto, Y. (2025). DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN BAGI REMAJA DI DESA WAIARA KECAMATAN KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA. *Populer*, 4(1), 110–118. <https://doi.org/10.58192/populer.v4i1.2969>

- Dos Santos, A. M., Canal, S., dos Santos, M. S., & da Silva, K. F. W. (2025). LAÇOS DE AFETO: O IMPACTO DAS RELAÇÕES FAMILIARES NO DESENVOLVIMENTO DOS ADOLESCENTES (pp. 145–167). <https://doi.org/10.15448/1814.7>
- Fitria, A. D., Sianturi, A. C. K., Salwa, F., Haridani, H., Manik, H. F., Khairini, K., Dasopang, L. M., Lestari, N., Rahmawati, N. D., Sagala, S. S., & Arika, R. (2024). PERILAKU DAN SIKAP KARAKTERISTIK SERTA EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI DUSUN XIV DESA PERCUT. *EI-Mujtama*, 4(2), 757–767. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.1011>
- Jannah, R. (2023). DETERMINAN SOSIAL PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN DI KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 3(2), 53–64. <https://doi.org/10.55606/jikki.v3i2.1598>
- Kamarusdiana, K., Rasyid, H., Ilahi, M. R., & Shomad, B. A. (2024). RELASI TOKOH MASYARAKAT DAN LEMBAGA NEGARA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.15408/harkat.v20i1.41232>
- Khairunnisa, C. A., Sitorus, S. A. M., Puspita, V. D., & Maryati, I. (2024). EXPLORATION OF FACTORS INFLUENCING EARLY MARRIAGE IN ADOLESCENTS: A LITERATURE REVIEW. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 12(2), 205–214. <https://doi.org/10.33366/jc.v12i2.5694>
- Kox, J. H. A. M. (2023). EARLY MARRIAGE FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9fps8>
- Lee, J. H., & Gu, Y. (2024). FOSTERING OPEN DIALOGUE: CREATING SAFE SPACES FOR ADOLESCENTS TO DISCUSS SEXUAL HEALTH. *Georgetown Medical Review*, 8(1). <https://doi.org/10.52504/001c.121577>
- Maharani, D., & Zain, A. (2023). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, EKONOMI KELUARGA, DAN FAKTOR SOSIAL BUDAYA TERHADAP PENINGKATAN PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT MUSLIM KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4192. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11360>
- Moilanen, K. L. (2024). SELF-REGULATION. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-96023-6.00080-4>

- Muham, A. P., Sani, A. S. A., Pulungan, A. M., Putri, F. M., Manurung, M. A. R., Nadeak, P., & Rachman, F. (2024). ANALISIS FEMINISME LIBERAL PADA DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI. *Public Service and Governance Journal*. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1230>
- Nebhinani, N., & Jain, S. (2019). ADOLESCENT MENTAL HEALTH: ISSUES, CHALLENGES, AND SOLUTIONS. 3(1), 4. https://doi.org/10.4103/AIP.AIP_24_19
- Rohmaniyah, I. (2018). KONSTRUKSI SEKSUALITAS DAN RELASI KUASA DALAM PRAKTIK DISKURSIF PERNIKAHAN DINI. 16(1), 33–52. <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2017.161.33-52>
- Samsidar, S., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2024). HUKUM PRIVAT ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA. *Al-Syakhshiyah*, 6(2), 272–291. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7715>
- Swantiana, D., Erhamwilda, & Surbiantoro, E. (2024). ANALISIS POLA ASUH ORANG TUA YANG MENIKAH DINI DAN KAITANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK. *Bandung Conference Series Early Childhood Teacher Education*, 4(1), 184–191. <https://doi.org/10.29313/bcsecte.v4i1.15033>
- Syarda, A., Hasanuddin, & Saifuddin. (2024). EDUKASI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI MUDA UNTUK PERNIKAHAN YANG MATANG. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21824>
- Tian, Y. (2024). RISK TAKING IN ADOLESCENTS AND RELEVANT FACTORS. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.54097/3kh7q066>
- van Veen, S., van Moorten, R., & Durani, W. (2018). MARRIAGE DECISION-MAKING: A FAMILY AFFAIR – INSIGHT INTO MARRIAGE DECISION-MAKING PROCESSES AND SOCIAL NORMS AROUND CHILD MARRIAGE IN PAKISTAN. Oxfam. <https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620535>